



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BAHARUDDIN NURDIN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **415000**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 805.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/200 m2 di KAB / KOTA LUWU, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/10000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 350.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TAFT RANGER JEEP Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 40.250.000**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 210.481.001**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.405.731.001
III. HUTANG	Rp.	379.453.360
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.026.277.641

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.